

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo

Adapun konsep revolusi mental dalam pandangan Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi), dapat ditelusuri melalui naskah-naskah resmi pemerintah, baik itu Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah melacaknya melalui Program Nawacitanya bersama Jusuf Kalla. Nawacita adalah istilah serapan dari Bahasa Sanskerta yang secara etimologi berarti nawa (sembilan) dan cita (agenda, harapan, keinginan). Istilah ini merujuk kepada visi dan misi yang dicanangkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Nawacita berisi sembilan agenda besar pemerintahan untuk melanjutkan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.¹¹³

Adapun isi dari Program Nawacita tersebut adalah:

1. Menghadirkan negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pertahanan negara Tri Matra terpadu.

¹¹³ Syamsi, Syam Surya. 2015. *Nawacita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi*. Jurnal Teknologi. Vol. I No. I. September 2015. Departemen of Green Economy, Surya University.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas kepada upaya pengembalian kepercayaan publik pada institusi-institusi negara.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat setiap daerah/desa dan melakukan politik desentralisasi dalam pemerintahan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, yakni dengan membangun infrastruktur jalan tol 2000 km, 10 pelabuhan, 10 bandara udara, 10 kawasan industri, pasar tradisional sebanyak 5.000 titik, dan bank khusus untuk pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, kedaulatan pangan, energi, dan keuangan.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengutamakan aspek pendidikan kewarganegaraan secara proporsional, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Konsep revolusi mental Jokowi tersurat dalam poin ke-8 (h) melalui penataan kembali kurikulum yang telah berlaku di sekolah-sekolah di Indonesia, dengan penekanan kepada aspek pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tersebut meliputi sejarah bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta air, bela negara, dan budi pekerti. Presiden Jokowi menjelaskan arti dari revolusi mental yang dimaksud adalah menggalakkan pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian

dan jati diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti Soekarno, untuk perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.¹¹⁴

Revolusi mental Jokowi meliputi lima program gerakan yang menjadi acuan utama, yakni Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia mengacu kepada tiga nilai strategis instrumental yaitu nilai integritas, nilai etos kerja, dan nilai gotong royong.¹¹⁵ Kelima program di atas pada dasarnya bertujuan untuk membudayakan pola hidup bersih, tertib, mandiri, dan toleransi serta demokratis. Adapun Indonesia Melayani lebih diarahkan kepada pembenahan layanan publik yang selama ini dinilai kurang maksimal dan cenderung berbelit-belit.

Setidaknya ada tujuh kementerian yang berkaitan langsung dengan gerakan utama revolusi mental. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan gerakan Indonesia Melayani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bertanggung jawab atas gerakan Indonesia Bersih. Gerakan Indonesia Tertib diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas gerakan Indonesia Mandiri. Yang terakhir adalah gerakan Indonesia Bersatu yang berada di bawah tanggung jawab Menteri

¹¹⁴ Widodo, Jokowi. 2014. *Revolusi Mental*. Harian Kompas 10 Mei 2014.

¹¹⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Dalam Negeri. Adapun bertindak sebagai koordinator dari kelima gerakan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang kepadanya laporan harus disampaikan paling sedikit empat bulan sekali.

Untuk merealisasikan program revolusi mental, Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan produk hukum yang disebutnya sebagai Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut GNRM).¹¹⁶ Naskah ini menjelaskan bahwa GNRM adalah sebuah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup, dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Gerakan ini adalah tanggung jawab semua pihak dan harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara masif agar terwujud kehidupan yang lebih baik.

Di samping merealisasikannya secara masif melalui beberapa kementerian, revolusi mental Jokowi juga diaplikasikan melalui sistem pendidikan formal dengan istilah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Program ini merupakan

¹¹⁶ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.¹¹⁷

Karakter yang hendak ditanamkan melalui satuan pendidikan mengacu kepada nilai-nilai yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter dengan bersumber ajaran agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Karakter yang dimaksud adalah (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.¹¹⁸

Dengan demikian dapat dikonfirmasi bahwa nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada bangsa Indonesia melalui revolusi mental Jokowi ini adalah nilai yang berjumlah 18 butir sebagaimana disebut di atas. Maka, konsep revolusi mental Jokowi adalah sebuah upaya untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup, dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila (18

¹¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

¹¹⁸ Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. h. 7

butir karakter) yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tentu perubahan yang dimaksud di sini bersifat mendasar (radikal) dan dalam jangka waktu yang cepat.

B. Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Islam mengenal tiga istilah populer dalam menggambarkan sistem pendidikannya, yakni *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*. Di antara ketiganya, term *tarbiyah* inilah yang sering digunakan untuk merumuskan konsep pendidikan Islam, termasuk di kalangan dunia Arab.¹¹⁹ Lain halnya dengan Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang menggunakan term *ta'dib* dalam membahas tentang pendidikan karakter, karena menurutnya konsep *tarbiyah* yang selama ini merepresentasikan kata pendidikan tidaklah memberi makna yang benar.¹²⁰

Term *tarbiyah* sebenarnya merupakan istilah baru untuk merepresentasikan makna pendidikan yang muncul bersamaan dengan gerakan pembaharuan pendidikan di dunia Arab pada awal abad ke-20. Oleh karena itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber klasik tentang term *tarbiyah*, tapi justru yang ada adalah *ta'lim*, *tahdzib*, atau adab.¹²¹ Sementara Al-Attas melihat bahwa istilah *tarbiyah*

¹¹⁹ Syah, Ahmad. 2008. *Term Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Fikra. Vol. VII No. I, Januari-Juli 2008. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

¹²⁰ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 35

¹²¹ Mursa, Muhammad Munir. 1977. *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah: Ushuluha wa Tathawwuruha fi Al-Bilad Al-Arabiyah*. Kairo: 'Alam Al-Kutub. h. 17

merupakan terjemahan dari bahasa latin *educare* dan *educatio* yang dalam bahasa Inggris adalah *educate*. *Tarbiyah* dalam konotasinya dengan *education* berarti hanya mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan material saja sesuai dengan masyarakat, manusia, dan negara yang bersifat sekuler. Karena dalam kajian kitab klasik tidak ditemukan term *tarbiyah* dengan makna pendidikan.¹²² Kalaupun dalam istilah *education* juga mengandung unsur pembinaan intelektual dan moral, tapi sebagai sumbernya bukanlah wahyu melainkan hasil spekulasi tentang etika yang disesuaikan dengan tujuan fisik material orang-orang sekuler.¹²³

Istilah *tarbiyah* sebagaimana yang ditemukan dalam kamus bahasa Arab, berakar pada *raba-yarbu* yang artinya bertambah dan tumbuh. Lalu juga *rabiya-yarba* yang berarti berkembang, juga dari *rabba-yarubbu* yang berarti menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Dari ketiga akar di atas, tidak satupun yang secara alami mengandung unsur pokok pendidikan, yaitu pengetahuan, inteligensi, dan kebijakan. Selain itu, *tarbiyah* juga tidak terbatas pada aktivitas manusia saja, ia berlaku untuk seluruh spesies binatang dan tumbuhan.¹²⁴ Oleh karena itu, menurut Al-Attas, *tarbiyah* tidak cocok untuk merepresentasikan makna pendidikan dalam arti Islam. Lebih lanjut, Al-Attas

¹²² Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas)*. h. 24

¹²³ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 35

¹²⁴ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 25

menegaskan bahwa kata *tarbiyah* hanya mengandung arti rahmat atau kasih sayang dan pemeliharaan.¹²⁵

Berikutnya adalah term *ta'lim* yang juga kerap digunakan untuk menunjuk pada konsep pendidikan dalam Islam. Istilah ini terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali (25 *fi 'il madhi* dan 16 *fi 'il mudhari'*), yang mengandung arti di antaranya informasi, nasihat, pengajaran, bimbingan, ajaran, pendidikan formal, latihan, pendidikan, dan pekerjaan magang.¹²⁶ Menurut Abdul Fattah Jalal, term *ta'lim* setidaknya mengandung dua pokok, pertama adalah proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan hati. Kedua adalah proses tersebut tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan saja, tapi juga sikap dan perilaku. Karena sebuah pengetahuan yang hanya sampai pada wilayah kognitif saja tidak akan mendorong seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Melalui pendidikan seperti ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan para sahabat untuk dapat mencapai tingkat penyucian diri (*tazkiyah*) yang selanjutnya mereka mampu mencapai tingkat *al-hikmah*, yang dapat membentuk kepribadian yang kokoh.¹²⁷ Demikian pula M. Nasir Budiman yang memandang bahwa istilah *ta'lim* inilah yang lebih cocok digunakan dari pada *tarbiyah*, di mana *ta'lim* mencakup aspek-aspek

¹²⁵ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 70

¹²⁶ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 28

¹²⁷ Ali, Heri Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos. h. 6

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang.¹²⁸ Tapi lagi-lagi Al-Attas memandang bahwa term *ta'lim* tetap tidak dapat mewakili pengertian pendidikan dalam Islam karena pemakaiannya dalam Al-Qur'an yang bersifat umum, bukan hanya untuk manusia saja.

Selanjutnya adalah istilah *ta'dib*, yang dalam perumusannya mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah adab. Menurut Al-Attas, pendidikan pada dasarnya adalah terletak pada term *ta'dib* yang berakar kata *adaba* dengan artinya sebagai mendidik, undangan perjamuan, kebudayaan, tata tertib sosial, kehalusan budi, kebiasaan yang baik, menghias, ketertiban, kepantasan, kemanusiaan, dan kesusasteraan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur Al-Anshari Ar-Ruwaifi'i Al-Afriqi (Ibnu Mandzur 1232-1311) dengan ungkapan *addabahu fa ta'addaba* (mengundang seseorang dalam jamuan maka ia menjadi beradab) yang berarti mendidiknya, dengan isyarat kepada jamuan yang dipersiapkan oleh tuan rumah untuk orang-orang terhormat yang diundangnya.¹²⁹ Para tamu undangan yang mendapat kesempatan menghadiri ini tentulah orang-orang terhormat yang tindakan dan perilakunya baik, yang kemudian menjadikan mereka diundang oleh tuan rumah. Karena pemilihan tuan rumah atas tamu yang akan diundang menggunakan pertimbangan akan kebaikan perilaku tamunya.

¹²⁸ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 30

¹²⁹ Mandzur, Ibnu. 1990. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir. h. 202

Selain itu, istilah *ta'dib* sebenarnya sudah ada sejak periode paling awal dalam sejarah Islam, sebagaimana yang ditemukan dalam hadis Nabi:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

“Tuhanku telah mendidikku, dan dengan demikian menjadikan pendidikanku yang terbaik”

Hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa term *ta'dib* inilah yang sesuai dengan pengertian pendidikan. Nabi Muhammad sebagai perwujudan dari kesempurnaan akhlak telah memberitakan soal ini melalui hadis tersebut. Konsep adab telah sejak awal dipahami sebagai pendidikan Islam. Bahkan saat itu, ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia juga disebut dengan adab. Semua buku pada berbagai disiplin ilmu saat itu dinamakan dengan “*kutub al-Adab*”, yang selanjutnya terkenal kitab “*Al-Adab Al-Kabir*” dan “*Al-Adab Al-Shaghir*” karangan Ibnu Al-Muqaffa (724-759).¹³⁰ Bahkan pada saat itu, seorang ahli pendidikan dikenal dengan sebutan *mu'addib*.¹³¹ Namun pada masa Daulah Abbasiyah pengertian adab mulai mengalami pergeseran dan menjadi terbatas pada kesusasteraan saja.¹³² Hal ini terjadi ketika para ulama melakukan spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan term adab hanya dipakai untuk ilmu akhlak atau etika. Selain itu, kekacauan dalam memahami istilah ini juga

¹³⁰ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 34

¹³¹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 73

¹³² Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 33

muncul akibat dari doktrin-doktrin sekularisme yang cenderung mengutamakan logika sejak masa Renaissance.¹³³ Sebagai akibat dari tidak digunakannya istilah *ta'dib* dalam pendidikan adalah hilangnya adab dan hilangnya keadilan, yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan serta kesalahan dalam pengetahuan.

Al-Attas menekankan bahwa pengajaran dan pengasuhan betapapun ilmiahnya tetap tidak dapat disebut dengan pendidikan jika di dalamnya tidak ada proses penanaman sesuatu yang berupa adab.¹³⁴ Seseorang yang memiliki adab akan mampu mencegah dirinya dari kesalahan penilaian. Selanjutnya orang yang beradab akan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat pada situasi dan kondisi apa saja dengan porsi yang adil. Manusia seperti inilah yang dipandang sebagai manusia yang adil, yaitu mampu menjalankan adab pada dirinya hingga ia menjadi manusia yang baik.

Keadilan yang dimaksud, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Fadhel Al-Jamali (1903-1997) tentang tujuan pendidikan Islam, mencakup empat ranah, yaitu pengenalan manusia akan perannya sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pengenalan manusia akan interaksi

¹³³ Hasbullah, Maisarah and Mohd Hazim Shah Abdul Murad. 2018. *The Rise of Modern Science: Islam and The West*. Journal Philosophy East and West. Vol. LXVIII. No. I, January 2018. University of Hawai'i Press.

¹³⁴ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 31

sosial dan bermasyarakat, pengenalan manusia akan hikmah penciptaan alam semesta, dan terakhir adalah pengenalan manusia akan Sang Pencipta alam ini.¹³⁵

Sejalan dengan Al-Jamali, keadilan dalam konsep pendidikan karakter Al-Attas mengacu kepada penjelasannya mengenai hakikat manusia. Manusia adalah binatang rasional yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hayawan al-natiq*.¹³⁶ Kata *natiq* berarti rasionalitas yang dimiliki oleh manusia berupa akal, di samping fakultas batin yang mampu merumuskan makna-makna. Sementara “makna” yang dimaksud adalah pengakuan tempat-tempat segala sesuatu yang berada di dalam suatu sistem.¹³⁷ Manusia dengan rasionalitasnya berfungsi sebagai *khalifah* di muka bumi, yang dalam konsep Al-Jamali, manusia mengenal dirinya sebagai makhluk sosial (warga negara) dan bersikap bijak terhadap alam sekitar. Sedangkan dengan fakultas batinnya, manusia berfungsi sebagai *‘abdu*n yang dengannya ia mengenali dirinya sebagai pribadi yang berkewajiban untuk menyembah Allah.

Secara rinci, M. Nasir Budiman menjelaskan manusia kepada empat klasifikasi yaitu hakikat manusia secara umum sebagai makhluk Allah untuk bertakwa kepada-Nya, hakikat manusia sebagai subyek didik, hakikat manusia sebagai pendidik, dan hakikat manusia sebagai anggota masyarakat.¹³⁸ Keadilan

¹³⁵ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 40

¹³⁶ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion and The Foundation of Ethics and Morality*. Malaysia: Percetakan Mesbah Sdn. h. 19

¹³⁷ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 22

¹³⁸ Budiman, M. Nasir. 1999. *Ilmu Pendidikan II*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. h. 7-8

dalam Islam bukanlah sebuah konsep yang terjadi dalam tatanan negara yang dapat menentukan keputusan antara dua orang ataupun antarkelompok, seperti antara satu orang dengan orang lain, antara kelompok sosial dengan negara, antara pemerintah dengan rakyat, antara raja dengan pengikutnya. Apakah seseorang dapat berbuat tidak adil terhadap dirinya sendiri? Inilah konsep keadilan dalam Islam, yang bahkan ketika seorang manusia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (sebagaimana fungsi manusia) sebenarnya termasuk tindakan yang tidak adil.¹³⁹

Manusia adil adalah yang memberikan porsi yang sesuai terhadap fakultas batin dan aspek rasionalitasnya. Maksud porsi yang sesuai di sini adalah bahwa fakultas batin hendaklah mengakui tempat-tempat yang tepat akan segala sesuatu, yang selanjutnya akan mengakui tempat yang tepat bagi Sang Pencipta. Jika demikian, seorang manusia akan menjadi *insan kamil* yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam urusan tata sosial. Dengan begitu dia juga telah menjalankan fungsinya sebagai *khalifah*, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai kepribadian Rasulullah SAW sebagai prototipe dalam konsep *insan kamil*. Fungsi *khalifah* karena manusia telah diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjalankan “pemerintahan” (mengatur dirinya) sesuai keinginan Allah.¹⁴⁰ Sebaliknya, jika seorang manusia hanya mengandalkan fakultas rasionalnya saja untuk menjalankan fungsinya

¹³⁹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion...* h. 26

¹⁴⁰ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion...* h. 16

sebagai *khalifah*, belum tentu ia akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai *'abdun*. Maka dalam konsep pendidikan karakternya, Al-Attas tidak menjadikan negara sebagai standar pendidikannya, tetapi lebih kepada mencetak manusia yang adil.

Penekanan Al-Attas terhadap aspek adab sebagaimana uraian di atas menerangkan bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang hendaklah diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan. Karena ilmu tidaklah bebas nilai (*value free*) melainkan sarat akan ilmu (*value laden*), di mana nilai-nilai Islami menghendaki pemiliknya untuk mengamalkan ilmu tersebut demi kemaslahatan umat manusia.¹⁴¹ Oleh karena itu, istilah *ta'dib* juga mengarahkan kepada konsep ilmu dan amal yang dalam penjelasannya digunakan istilah pengenalan, hingga menjadi manusia yang sempurna (*insan kamil*). Karena ilmu tanpa amal adalah sebuah kecongkakan, dan amal tanpa adanya ilmu merupakan sebuah kejahilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah *ta'dib* telah mengandung unsur pengajaran (*ta'lim*) dan pengasuhan (*tarbiyah*).¹⁴² Sehingga tidaklah penting menggabungkan istilah di atas ke dalam konsep *ta'dib*, karena *ta'dib* telah mencakup keduanya.

Penanaman adab hendaklah diutamakan karena adab dapat membentuk tabiat, kepribadian, dan sikap yang baik. Kategori baik yang dimaksud meliputi

¹⁴¹ Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan...* h. 34

¹⁴² Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 57

kehidupan spiritual dan materialnya, serta selalu berusaha menanamkan kebaikan yang telah diterimanya, sesuai dengan rukun Islam dan rukun Iman.¹⁴³ Ia juga menilai bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bertanggung jawab, sebagaimana konsep ilmu dan amal, untuk menjalankan kewajiban dan tugas akhlakiyahnya kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.¹⁴⁴

Al-Attas menyatakan bahwa adab merupakan disiplin tubuh, jiwa, dan ruh yang dapat menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual, dan ruhaniah. Maksudnya adalah dengan adab, seorang manusia dapat menggunakan seluruh kemampuannya untuk memahami Islam dengan baik, lalu diikuti dengan keadaan selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agama oleh tubuh, jiwa, dan ruhnya.¹⁴⁵

Corak pemikiran pendidikan karakter Al-Attas adalah penekanannya kepada ilmu *fard 'ain* dan ilmu *fard kifayah*. Penekanan ini merupakan kelanjutan dari perhatiannya terhadap kewajiban menuntut ilmu, di mana sifat ilmu adalah tidak terbatas, sedangkan kehidupan manusia sangatlah terbatas.¹⁴⁶ Selanjutnya, Al-Attas berkeyakinan bahwa struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan Islam hendaklah berorientasi kepada hakikat manusia yang bersifat ganda (dwi-

¹⁴³ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion...* h. 30

¹⁴⁴ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2001. *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC. h. 83

¹⁴⁵ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 53

¹⁴⁶ Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. *Filsafat dan Praktik...* h. 271

sifat), fisik dan spiritual. Maka, ilmu juga terdiri dari dua jenis, yang pertama adalah ilmu berian dari Allah SWT dan yang kedua adalah ilmu capaian. Pada hakikatnya semua ilmu adalah dari Allah, namun cara kedatangan dan indera penerima yang menafsirkan ilmu tersebutlah yang berbeda. Ilmu yang termasuk dalam bagian ilmu *fard 'ain* meliputi ilmu-ilmu agama di mana setiap manusia diwajibkan mempelajarinya. Adapun pembagian yang kedua adalah ilmu *fard kifayah*, yang terdiri dari ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis, yang hanya diwajibkan untuk sebagian muslim saja.¹⁴⁷ Kewajiban untuk kelompok ilmu yang kedua ini memang dapat diubah ke dalam kategori wajib dalam hal mereka yang memandang dirinya terikat kewajiban untuk mempelajarinya demi mencapai kebaikan bagi diri mereka.¹⁴⁸ Dari pembagian inilah Al-Attas menerapkan kurikulum dalam pendidikan karakter berikut:

1. Ilmu-ilmu Agama¹⁴⁹

- a. Ilmu Al-Qur'an : tafsir dan *ta'wil*;
- b. Ilmu Al-Sunnah : sejarah Nabi, hadis, riwayat, dan pesan atau nasihat lainnya;
- c. Ilmu Al-Syari'ah: hukum, prinsip, aturan, dan ajaran Islam (Islam, Iman, dan Ihsan);

¹⁴⁷ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 86

¹⁴⁸ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1981. *Islam dan Sekularisme*. Terj. Karsidjo Djojosedjono. Bandung: Penerbit Pustaka. h. 20

¹⁴⁹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 89

- d. Ilmu Teologi : sifat-sifat, nama, tindakan, dan esensi Tuhan (Tauhid);
- e. Ilmu Metafisika : psikologi, ontologi, filsafat, dan kosmologi (tasawuf) yang benar;
- f. Ilmu Linguistik : bahasa Arab, sastra, leksikografi, dan semacamnya.

2. Ilmu-ilmu Rasional, Intelektual, dan Filosofis¹⁵⁰

- a. Ilmu yang berkaitan dengan kemanusiaan;
- b. Ilmu yang berkaitan dengan alam;
- c. Ilmu terapan;
- d. Ilmu yang berkaitan dengan teknologi.

Pada kategori ilmu rasional, intelektual, dan filosofis haruslah dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari penafsiran-penafsiran yang berdasarkan ideologi asing atau sekuler. Selanjutnya dilakukan pula kombinasi dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam agar muatan dan kandungan dalam setiap materi bernuansa Islami. Proses inilah yang oleh Al-Attas disebut dengan Islamisasi. Ilmu yang di dalamnya telah dilakukan Islamisasi, akan menjamin adanya kesinambungan dan keserasian antara ilmu agama dan ilmu non-

¹⁵⁰ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 90

agama.¹⁵¹ Selain itu, Islamisasi juga akan mempengaruhi pikiran dan nalar yang tercerahkan dengan ilham ketuhanan.¹⁵²

Demikian halnya dengan perumusan metode pendidikan karakter, Al-Attas menekankan pada adab, sebagaimana definisinya tentang pendidikan yang berarti sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sebuah proses yang dapat diperoleh secara mutlak dengan metode khusus.¹⁵³ Oleh sebab itu, muatan pendidikan hendaknya lebih diprioritaskan daripada metode pengajarannya, meskipun institusi pendidikan Muslim modern banyak yang mengadopsi ide Barat yang lebih menekankan kepada metode daripada materi.¹⁵⁴ Namun demikian, metode atau proses tetaplah dipandang penting dalam sebuah upaya pendidikan dalam Islam.

Selain itu, pembagian ilmu yang dilakukan oleh Al-Attas memberikan isyarat bahwa fakultas batin manusia hendaklah lebih diprioritaskan dari pada sisi rasionalitasnya. Hal ini terlihat dari sikap kewaspadaannya terhadap pengaruh budaya sekularisme Barat yang dewasa ini telah banyak diadopsi sebagai landasan dalam sistem pendidikan. Fakultas rasional manusia yang melahirkan ilmu terapan (ilmu rasional, intelektual, dan filosofis) dalam klasifikasi ilmu Al-Attas tidaklah dikategorikan dalam ilmu *fard 'ain* atau wajib. Selain itu, ilmu-

¹⁵¹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 91

¹⁵² Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1981. *Islam dan...* h. 63

¹⁵³ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 36

¹⁵⁴ Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. *Filsafat dan Praktik...* h. 266

ilmu tersebut hendaklah terlebih dahulu dilakukan Islamisasi, yaitu dibersihkan dari pengaruh Barat dan diresapi dengan ajaran Islam.

Secara lengkap, konsep pendidikan karakter menurut Al-Attas sebagaimana dirumuskan dari beberapa unsur kunci di atas yaitu pengenalan dan pengakuan, yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan (hal dan keadaan ada).¹⁵⁵

Dari uraian di atas, tampak bahwa konsep pendidikan karakter Al-Attas berbeda dengan konsep pendidikan karakter yang diuraikan pada bab sebelumnya, yang merupakan usaha internalisasi nilai-nilai kebajikan yang dengan sadar dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, sekaligus pemberian benih agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan watak dan kepribadiannya menjadi lebih berkualitas sebagai landasan dalam cara memandang, bersikap, berpikir, dan bertindak.

Memang konsep Al-Attas tampak sederhana karena menggunakan istilah yang diulang-ulang. Tapi pada hakikatnya, menurut Imam Bawani pemilihan kata tersebut justru menunjukkan kesan abstrak dan filosofis yang tinggi.¹⁵⁶ Konsep Al-Attas tidak terlalu memperhatikan unsur-unsur praktis yang pada era modern

¹⁵⁵ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 52

¹⁵⁶ Bawani, Imam. 1987. *Segi-segi Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs. h. 28

ini malah dinilai penting. Ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Attas tidak terpengaruh oleh ide-ide sekuler Barat yang dewasa ini diikuti oleh sebagian besar tokoh pendidikan.

C. Sejarah Revolusi Mental

Revolusi mental bukanlah barang baru dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Meskipun pada dekade kedua abad ke-21 ini revolusi mental berhasil dipopulerkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) hingga menjadi jargon utamanya saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Menurutnya, revolusi mental adalah sebuah keniscayaan, di mana seluruh warga Indonesia mengerti, memahami, dan mengenal karakter asli bangsa. Karakter asli dapat disebut juga kultur budaya Indonesia yang memang memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan pada tahun 1901, seorang perintis pers Indonesia, Abdul Rivai (1871-1937) turut menyerukan bahwa semaju apapun zaman hendaklah kepribadian “Hindia” tetap menjadi pegangan bagi kaum bumiputera.¹⁵⁷ Di antara karakter khas Indonesia tersebut adalah santun, ramah, gotong royong, berbudi pekerti, dan lain sebagainya. Seyogyanya, karakter-karakter tersebut menjadi modal utama untuk membuat rakyat sejahtera.¹⁵⁸

Namun kenyataannya, kian hari karakter justru berubah dan mengalami dekadensi yang tak terelakkan. Inilah yang sebenarnya menjadi akar terjadinya

¹⁵⁷ Margana, Sri. 2014. *Revolusi Mental...* h. 69

¹⁵⁸ Ibad, Nurul. 2015. *Jokowi dalam Cermin Dunia: Antara Simpati dan Sinisme*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti. h. 21

tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, rusaknya birokrasi, buruknya etos kerja, hingga ketidakdisiplinan dalam bekerja. Dengan melihat kondisi bangsa yang begitu memprihatinkan, kehadiran gagasan revolusi mental menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah rindu akan kemajuan.

Di lain pihak, program revolusi mental justru dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan. Banyak yang memaknai kata revolusi sebagai perubahan yang cepat dan radikal. Hal ini terjadi mungkin karena memori lama tentang peristiwa Revolusi Kebudayaan di Cina, atau Revolusi Perancis, hingga Revolusi Rusia¹⁵⁹ yang menggambarkan bahwa revolusi dilakukan secara radikal, berdarah-darah, menyebabkan banyak korban, memberikan luka mendalam, dan penuh dengan kekerasan serta penyiksaan.

Dengan jargon revolusi mental ini, Jokowi dinilai beraliran kiri dan mengikuti paham sosialis komunis. Di antara faktor penyebab justifikasi negatif terhadap Jokowi tersebut adalah adanya indikasi untuk membuat pembagian dua kelompok besar dalam tatanan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Zainudin Maliki (Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya). Ia menilai bahwa revolusi mental Jokowi tersebut mirip dengan gerakan komunis (aliran kiri), di mana terjadi pembagian dua kelompok besar dalam masyarakat yaitu kelompok

¹⁵⁹ Saifuddin, Achmad Fedyani. 2014. *Revolusi Mental: Revolusi Mental = Revolusi Pendidikan (Prosesualisme dalam Pendidikan)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. h. 160

atas dan kelompok bawah. Kelompok atas terdiri dari agama, pendidikan, dan hukum, sedangkan kelompok bawah meliputi hubungan borjuis dengan kaum proletar.¹⁶⁰

Dr. H. Fadli Zon, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2014-2019, yang juga seorang politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turut memandang bahwa revolusi mental Jokowi mengikuti aliran filosof Jerman, Karl Marx (1818-1883) yang juga dipengaruhi oleh pemikiran seorang filosof atheis bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) di Berlin, Jerman. Ajaran tersebut ditujukan untuk program cuci otak (*brainwash*) dalam pengembangan paham sosialis komunis di wilayah Eropa, dan menyatakan bahwa agama menjadi hambatan dalam pengembangan aliran sosialis komunis. Fadli Zon juga menambahkan bahwa revolusi mental juga dipakai oleh pendiri Partai Komunis Cina Chen Duxiu untuk mempengaruhi para buruh petani agar melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran China.¹⁶¹

Penganut paham sosialis komunis memandang bahwa revolusi mental sangatlah penting bagi perjuangan mereka. Revolusi mental yang diajarkan oleh leluhur mereka, Karl Marx bertujuan untuk mengubah mental rakyat yang saat itu tengah terbius oleh agama dan mengatakan bahwa agama adalah *the opium of*

¹⁶⁰ Ibad, Nurul. 2015. *Jokowi dalam...* h. 21

¹⁶¹ Ibad, Nurul. 2015. *Jokowi dalam...* h. 22

the masses.¹⁶² Agama dijadikan sebuah media untuk mengelabui rakyat dan menutupi kegagalan penguasa dalam mengelola negara, sehingga rakyat lupa akan penderitaan dan kesengsaraan mereka. Kondisi inilah yang membuat Marx menggerakkan massa dengan ide revolusi mental untuk segera mengadakan perlawanan terhadap pemerintah. Inilah poin utama dalam revolusi mental yang digagas oleh penganut sosialis komunis untuk berani menuntut haknya kepada negara.

Negara dan agama adalah musuh besar bagi rakyat atau kaum proletar. Sehingga negara yang tidak menganut paham komunis dinilai justru akan menyengsarakan rakyat. Demikian halnya agama yang hanya menjadi media kebohongan untuk mengelabui rakyat hingga lupa akan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, kedua musuh tersebut haruslah dilawan dan dihilangkan. Negara harus dikuasai untuk selanjutnya dijadikan negara komunis.¹⁶³ Di sini, mental yang kuat sangatlah dibutuhkan untuk merealisasikannya. Itulah sebabnya mengapa revolusi mental menjadi sangat strategis untuk menanamkan keyakinan kepada rakyat. Melalui sebuah perubahan dalam lingkungan sosial, maka mental dan karakter manusia akan dapat terbentuk. Manusia dipandang hanya sebagai objek yang mental atau karakternya

¹⁶² McLellan, David et al. 2000. *Karl Marx Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right. Karl Marx Selected Writings*. Oxford: Oxford University Press. h. 71

¹⁶³ Mubarak, Muhammad Yakub. 2017. *Problem Teologis Ideologi Komunisme*. Jurnal Tsaqafah Peradaban Islam. Vol. XIII No. I, Mei 2017. Ponorogo: Unida Gontor.

dibentuk melalui perubahan lingkungan sosialnya, dan unsur subjektivitas tidaklah memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan mental individu.

Jika benar bahwa revolusi mental Jokowi terinspirasi dari ajaran sosialis komunis, maka mental atau karakter bangsa Indonesia, sebagaimana pandangan paham ini, hanya akan terbentuk karena pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, watak dan faktor hereditas tidaklah memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan karakter bangsa. Sehingga dalam proses pelaksanaan program revolusi mental ini, haruslah berorientasi pada perubahan lingkungan secara total, baik struktur maupun kultur, meski harus menghilangkan peran agama dalam merealisasikannya.

Namun, meski beberapa pandangan menilai bahwa revolusi mental Jokowi beraliran kiri dan kental dengan ajaran sosialis komunis, tetap saja bukti dan argumen yang diajukan tidaklah begitu kuat. Sikap penolakan mereka cenderung bernuansa politis. Para kritikus menggunakan strategi, meminjam istilah Karl R. Popper, *utopian social engineering*¹⁶⁴ yang hanya melontarkan kelemahan revolusi mental Jokowi tanpa menawarkan alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk memperbaiki karakter bangsa Indonesia.

Jika menelusuri ajaran dari aliran non-sosialis komunis (aliran kanan), revolusi mental relevan dengan paham liberalis kapitalis. Salah seorang tokoh

¹⁶⁴ Widigdo, Mohammad Syifa Amin. 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia: Kaum Muda dan Pemilu 2004*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 43

aliran kanan ini adalah Max Weber (1864-1920), pakar sosiologi asal Jerman yang ajarannya banyak mengkritisi paham Karl Marx. Pemikiran Weber tentang sosiologi membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu sosiologi di dunia. Weber berfokus pada gagasan dan nilai sosiologis yang dapat menjadi alternatif dalam cara berpikir, sekaligus menjadi kritik tajam bagi paham Marxisme yang sosialis komunis.¹⁶⁵ Karena paham sosialis komunis memiliki tendensi untuk selalu berusaha menghilangkan aspek spiritual dari diri manusia, yang disebutnya dengan aktivitas penidak-keramatan alam.¹⁶⁶

Secara singkat, pemikiran Weber tentang tindakan manusia terbagi menjadi empat tipe. Pertama adalah rasional instrumental yaitu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan dilandasi rasionalitas demi sebuah tujuan. Tipe kedua yaitu rasional nilai yang mengacu pada tindakan yang didasari oleh kepercayaan terhadap ajaran tertentu. Ketiga yakni tipe afeksi, mengacu kepada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seorang individu. Tipe keempat adalah tradisional, di mana tindakan didasari oleh tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan sejak nenek moyang manusia.¹⁶⁷

Melalui salah satu karya monumentalnya yang berjudul *Basic Sociological Terms*, Weber menjelaskan bahwa setiap tindakan individu terhadap individu atau kelompok lainnya adalah bersifat subjektif. Fokus kajian sosiologinya

¹⁶⁵ Weber, Max. 2006. *Sosiologi. From Max Weber: Essays in Sociology*. Terj. Noorkholis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 55

¹⁶⁶ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1981. *Islam dan...* h. 21

¹⁶⁷ Weber, Max. 2006. *Sosiologi. From Max Weber...* h. 67

adalah kepada tindakan sosial masyarakat, yang pada gilirannya sosiologi dapat memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang makna subjektif dari fenomena sosial tersebut. Subjektif di sini melihat bahwa mental dan karakter manusia terbentuk dengan adanya niat subyektif aktor.¹⁶⁸ Dengan demikian, aspek subjektivitas kejiwaan seseorang memiliki porsi yang sangat besar untuk melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya sendiri. Kondisi psikologis dengan tingkatannya yang berbeda pada setiap orang tersebut membutuhkan selalu membutuhkan peran agama untuk kebutuhan penentruman yang bermanfaat.¹⁶⁹ Sehingga, ambivalensi atau ketiadaan norma-norma religius yang sering terjadi merupakan sebuah masalah dan tantangan yang baru.¹⁷⁰

Mengacu kepada uraian di atas, revolusi mental Jokowi tampaknya juga memiliki kesamaan dengan ajaran Weber, meski tidak bisa dipastikan apakah ada keterkaitan di antara keduanya. Revolusi mental Jokowi, sebagaimana yang tercantum di dalam naskah resmi negara, tidak hanya sekedar untuk perubahan karakter secara cepat. Gagasan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran diri dan membangun sikap optimis dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara besar sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern.¹⁷¹

¹⁶⁸ Weber, Max. 2006. *Sosiologi. From Max Weber...* h. 69

¹⁶⁹ Weber, Max. 2002. *Sosiologi Agama. Terj. Muhammad Yamin*. Yogyakarta: Penerbit Ircisod. h. 156

¹⁷⁰ Weber, Max. 2002. *Sosiologi Agama...* h. 303

¹⁷¹ Budimanta, Arief, dkk. 2015. *Panduan Umum Gerakan Revolusi Mental*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. h. 6

Di sini terlihat jelas bahwa salah satu tujuan revolusi mental adalah untuk membangkitkan kesadaran diri dan membangun sikap segenap warga Indonesia. Kebijakan Jokowi yang mengakomodir aspek kesadaran diri inilah yang relevan dengan aliran kanan, di mana aspek subjektivitas diakui sebagai pemicu munculnya sebuah tindakan. Sehingga dalam penerapannya, revolusi mental tetaplah akan berhubungan dengan seluruh aspek di luar pendidikan, terutama agama. Agama dinilai memiliki peran yang sangat besar terhadap kesadaran diri bangsa Indonesia dan mampu menjadi dasar dalam usaha perbaikan mental di Indonesia.

Dalam konteks historisitas Indonesia, pada awal munculnya jargon revolusi mental Jokowi ini, presiden Indonesia ke-7 tersebut dipandang mengikuti jejak Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI yang didirikan pada tahun 1920 dan sejak tahun 1948 semakin gencar menyebarkan paham komunis itu sering menggunakan jargon revolusi mental untuk menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit (1923-1965), revolusi mental PKI menjadi sebuah langkah strategis untuk mengubah mental rakyat Indonesia yang terganggu oleh dogma agama. Meski sebenarnya sikap penolakan PKI terhadap eksistensi Islam Indonesia tidaklah sama persis dengan ajaran komunisme Marx yang menolak kehadiran agama sepenuhnya.

Tan Malaka (1897-1949) salah seorang pemimpin komunis Indonesia percaya bahwa Islam dapat digunakan untuk meraih cita-cita revolusioner. Demikian juga

tokoh lain seperti Haji Mohamad Misbach (1876-1926) dan Haji Tubagus Achmad Chatib (1885-1966) yang meyakini bahwa tidak ada perbedaan fundamental antara Islam dan Komunis.¹⁷² Secara umum gagasan Aidit dalam mengembangkan PKI mengadopsi ajaran-ajaran sosialis komunis yang diperkenalkan oleh Marx.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno (1901-1970) juga termasuk salah seorang tokoh yang kerap menggunakan istilah revolusi mental. Salah satunya adalah dalam pidato saat peringatan hari Proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1962 dengan tema Tahun Kemenangan.¹⁷³ Soekarno menjelaskan bahwa revolusi mental bertujuan untuk menggembleng manusia agar berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api menyala-nyala.¹⁷⁴ Pada substansinya, makna yang terkandung dalam gagasan itu adalah transformasi etos, yakni perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat dan moralitas, termasuk juga cara berfikir, cara merasa, dan cara mempercayai, yang menjelma ke dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.¹⁷⁵ Lebih luas lagi, Soekarno merefleksikan gagasan revolusi mental dalam konsep Trisaktinya, yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

¹⁷² Williams, Michael C. 2003. *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Terj. Chandra Utama. Yogyakarta: PT Syarikat. h. 3

¹⁷³ Ibad, Nurul. 2015. *Jokowi dalam...* h. 25

¹⁷⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2015. *Materi Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, 21 Agustus 2015*. Jakarta.

¹⁷⁵ Supelli, Karlina. 2014. *Revolusi Mental...* h. 6

Namun lagi-lagi, Soekarno juga dipandang beraliran kiri sebagaimana PKI karena sikapnya yang menganakemaskan kelompok komunis di antara partai-partai yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini didasari oleh keadaan saling membutuhkan dan memerlukan antara Soekarno dan PKI,¹⁷⁶ serta posisi Soekarno yang anti-Barat karena keputusannya untuk menarik Indonesia dari keanggotaan PBB akibat politik konfrontasi Malaysia.¹⁷⁷ Partai lainnya yang juga beraliran kiri adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan tokohnya Haji Agus Salim yang memandang bahwa kapitalisme harus dihilangkan.¹⁷⁸ Inilah yang terjadi di Indonesia, di mana sebagian besar partainya secara ideologis beraliran kiri¹⁷⁹ kecuali Partai Masyumi yang alirannya cenderung mendekati liberal.¹⁸⁰

Demikianlah sejarah munculnya istilah revolusi mental yang memang telah ada sejak abad pertengahan, dan hingga kini di Indonesia masih sering digunakan. Tentu kemunculannya di Indonesia ini mendapat respon dari berbagai kalangan, baik positif maupun negatif. Secara umum respon tersebut terbagi menjadi dua sikap, yaitu menolak secara historis dan menerima secara substantif. Perlu diakui bahwa secara historis istilah revolusi mental memang sangat khas

¹⁷⁶ Diniah, Hikmah. 2007. *Gerwani Bukan PKI*. Yogyakarta: Penerbit Carasvati Books. h. 66

¹⁷⁷ Diniah, Hikmah. 2007. *Gerwani...* h. 69

¹⁷⁸ Subekti, Valina Singka. 2014. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. h. 34

¹⁷⁹ Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta. h. 140

¹⁸⁰ Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir...* h. 135

dengan aliran komunis karena istilah ini sering digunakan untuk agenda kudeta terhadap sebuah kekuasaan.

Di lain sisi, substansi revolusi mental Jokowi ternyata juga memberikan perhatian terhadap kesadaran diri seseorang dalam perbaikan mental. Sehingga, perubahan mental dan karakter seseorang pada hakikatnya dipengaruhi oleh subyektivitas dalam dirinya. Hal ini mengkonfirmasi bahwa, secara substantif revolusi mental Jokowi sangatlah berbeda dengan paham sosialis komunis. Penolakan bahwa revolusi mental Jokowi tidak mengandung unsur pemberontakan juga disampaikan oleh Jusuf Kalla.¹⁸¹ Ia menghimbau masyarakat agar tidak salah mengartikan revolusi mental sebagai pemberontakan, karena yang dimaksud adalah sisi kecepatannya yaitu bekerja demi perubahan yang cepat.¹⁸² Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 juga turut menyuarakan kesannya. Ia menyatakan bahwa revolusi mental Jokowi tidaklah sama dengan Marx atau Hegel.

“Yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi tentang revolusi mental tidak sama sebenarnya dengan yang dicetuskan oleh Marx ataupun Hegel. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi ini ya merubah karakter (*karakter building*) yang saya setuju seratus persen”.¹⁸³

¹⁸¹ Pernyataan yang disampaikan oleh Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Debat Calon Wakil Presiden pada tanggal 29 Juni 2014.

¹⁸² Yuwono, Ismantoro Dwi. 2014. *Janji-janji Jokowi-JK: (Jika) Rakyat Tidak Sejahtera, Turunkan Saja Mereka!*. Yogyakarta: Media Pressindo. h. 27

¹⁸³ Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 25 April 2015 dengan tema “Jalan Menjadi Negara Maju”.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ungkapan revolusi mental bukan sesuatu yang baru muncul pada awal abad ke-21 ini. Istilah revolusi mental telah banyak dan sering digunakan dalam dialektika perjalanan sejarah pemikiran, manajemen, politik, sosial, baik di dunia Barat maupun Timur.

D. Ruang Lingkup Revolusi Mental Presiden Joko Widodo

Konsep revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo memiliki makna yang luas dan mendalam. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program revolusi mental ini dapat berlangsung cepat dan secara masif dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat agar terwujud kehidupan yang lebih baik. Terkait ukuran “cepat” sebagaimana disebutkan di atas, Jokowi tidak menguraikannya secara eksplisit dalam produk hukum negara tersebut. Namun dalam sebuah wawancara eksklusif saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Waduk Pluit, Jokowi menjelaskan bahwa program revolusi mental tidak bisa berlangsung cepat. Menurutnya, hasil dari program ini baru dapat dipanen sekitar 15 atau 20 tahun lagi. “Tetapi memang ini kita akan memanennya, ngunduhnya itu mungkin baru 15 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang”, jawabnya kepada reporter saat itu.¹⁸⁴

Jokowi melibatkan tujuh kementerian dalam pemerintahannya, dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan

¹⁸⁴ Pernyataan Joko Widodo saat menjadi narasumber dalam *Special Report* Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia di Waduk Pluit, Jakarta pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 dengan tema “Revolusi Mental”.

Maharani sebagai koordinatornya. Lima kementerian lainnya terbagi ke dalam lima program turunan dari revolusi mental, yaitu gerakan Indonesia Melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, gerakan Indonesia Bersih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, gerakan Indonesia Tertib oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, gerakan Indonesia Mandiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan gerakan Indonesia Bersatu oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun pelaksanaannya dalam satuan pendidikan formal, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disusunlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Berikut ini penulis akan menguraikan keenam gerakan di atas untuk mengetahui ruang lingkup masing-masing gerakan.

1. Gerakan Indonesia Melayani

Sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, gerakan Indonesia Melayani bertujuan untuk mewujudkan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara yang bersifat melayani. Gerakan ini berawal dari permasalahan yang ada di Indonesia dalam aspek

pelayanan publik yang dipandang belum maksimal.¹⁸⁵ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi penanggungjawab utamanya untuk menjalankan beberapa program yang terdiri dari tiga kategori yaitu peningkatan, penyempurnaan, dan penyederhanaan.¹⁸⁶

Peningkatan yang akan dilakukan dalam gerakan ini adalah peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur negara. Termasuk juga peningkatan perilaku penegakan hukum, pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, ditambah lagi dengan penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan. Lalu penyempurnaan dilakukan terhadap standar dan sistem pelayanan, sistem manajemen, juga aturan perundang-undangan. Adapun penyederhanaan dilakukan terhadap prosedur dalam pelayanan birokrasi agar lebih mudah dan ringan. Di sini, presiden juga akan menjalankan sistem penghargaan, sanksi, dan teladan.

2. Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat Indonesia yang bersih. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan, terutama pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan

¹⁸⁵ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁸⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Recycle.¹⁸⁷ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi penanggungjawab utamanya untuk menjalankan beberapa program yang secara umum terdiri dari empat kategori yaitu peningkatan, pengembangan, penyempurnaan, dan pemberian.

Peningkatan dilakukan terhadap kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, perilaku penegak hukum, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Pengembangan dilakukan terhadap sistem pengelolaan sampah yang holistik, mengingat Indonesia kini darurat sampah. Penyempurnaanpun turut dilakukan terhadap aturan perundang-undangan. Adapun pemberian, pemerintah memberikan kemudahan untuk pengelola sampah swasta dalam hal perizinan atau permohonan bantuan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat hendaklah diutamakan untuk percepatan dalam merealisasikannya.¹⁸⁸

3. Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat Indonesia yang tertib. Hal yang melatarbelakangi adanya gerakan ini adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku

¹⁸⁷ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁸⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

tertib dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.¹⁸⁹ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi penanggungjawab utamanya untuk menjalankan beberapa program yang secara umum adalah upaya peningkatan. Peningkatan yang dimaksud dilakukan terhadap kesadaran berperilaku tertib dalam penggunaan ruang publik, administrasi kependudukan, berlalu lintas, budaya antri, dan pengaduan yang baik. Termasuk juga peningkatan terhadap ketersediaan sarana prasarana, penegakan hukum, dan kondisi bebas kekerasan.¹⁹⁰

4. Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan Indonesia Mandiri bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri. Gerakan ini muncul karena kondisi bangsa Indonesia yang kurang kreatif, inovatif, dan produktif dalam hal perekonomian.¹⁹¹ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi penanggungjawab utamanya untuk menjalankan beberapa program yang secara umum adalah upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja dan kesadaran untuk cinta produk dalam negeri. Peningkatan juga dilakukan terhadap sikap mendukung ekonomi kreatif, usaha koperasi, produk

¹⁸⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁹¹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

kesenian dan kebudayaan, dan ketersediaan sarana prasarana agar terjadi pemerataan ekonomi di Indonesia.

Selain itu peningkatan juga dilakukan terhadap penelitian tentang ekonomi, pangan, dan energi, terutama yang dilakukan oleh ahli dalam negeri agar terjadi persaingan yang sehat dan pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Untuk mendukung semua ini, pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁹²

5. Gerakan Indonesia Bersatu

Gerakan Indonesia Bersatu bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh minimnya sikap saling menghargai dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia di samping keragaman yang dimilikinya.¹⁹³ Menteri Dalam Negeri menjadi penanggungjawab utamanya untuk menjalankan beberapa program yang secara umum adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan keragaman Indonesia. Peningkatan juga dilakukan terhadap kesadaran demokrasi dan nasionalisme Pancasila, sikap toleransi dan kerukunan antaragama, sikap melindungi kaum minoritas.

¹⁹² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁹³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Selain itu juga peningkatan terhadap sikap saling kerja sama dalam pembangunan, penegakan hukum, dan peran serta lembaga agama. Dalam hal ini, presiden memberi penekanan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang senantiasa mengajarkan toleransi.¹⁹⁴

6. Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

Penerapan program revolusi mental dalam satuan pendidikan formal baru dilakukan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan formal. PPK merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan PPK dalam satuan pendidikan formal.¹⁹⁵

PPK dilaksanakan dengan menerapkan 18 nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, yang merupakan perwujudan dari 5 nilai utama yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Prinsip dalam penerapan PPK adalah dilakukan melalui kurikulum dengan pembiasaan dan berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik,

¹⁹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

¹⁹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

yang menjunjung tinggi aspek keteladanan. Dalam hal ini, kepala sekolah bertindak sebagai inovator, motivator, dan kolaborator yang mengoptimalkan kemitraan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.¹⁹⁶

Penerapannya dalam dunia pendidikan adalah dengan menekankan kurikulum kepada pendidikan karakter, akhlak, dan mental. Kurikulum pembelajaran dalam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dibuat lebih besar persentasenya. Menurut Jokowi, 80% kurikulum dalam pendidikan di SD harus berbicara soal pendidikan karakter, akhlak, dan mental, barulah yang 20% lainnya berisi tentang pengetahuan. Sedangkan di SMP, pendidikan karakter sebesar 60% dan pengetahuan sebesar 40%.¹⁹⁷

E. Perbandingan Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dan Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Pada bab terdahulu telah dilakukan pembahasan tentang konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) dan konsep pendidikan karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Bab ini akan menguraikan masing-masing konsep agar dapat diketahui unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan agar peneliti memiliki pedoman untuk

¹⁹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

¹⁹⁷ Yuwono, Ismantoro Dwi. 2014. *Janji-janji Jokowi...* h. 22

mengetahui posisi konsep revolusi mental Jokowi jika ditinjau dari konsep pendidikan karakter Al-Attas.

Dalam aktivitas mengurai konsep-konsep ini, peneliti menggunakan standar atau pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), yaitu empat pilar; *learn to know, learn to do, learn to live together* dan *learn to be*. Alasan penggunaan empat pilar tersebut adalah karena relevansinya dengan konsep pendidikan pada umumnya, terutama di Indonesia sebagai negara majemuk dan multikultur, yang meski ada kurikulum nasional juga tetap mengakomodir materi kearifan lokal.¹⁹⁸ Adapun sistem pendidikan di Indonesia sementara ini mengikuti teori pakar psikologi Benjamin Samuel Bloom (1913-1999) dalam mengklasifikasikan tingkat perkembangan pendidikan anak secara obyektif, sebagaimana yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia dalam perumusan tujuan, penyusunan tes, dan pembuatan kurikulum.¹⁹⁹ Klasifikasinya yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom ini terdiri dari tiga butir, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurutnya, setiap anak memiliki ketiga aspek ini dalam proses perkembangan pendidikan dalam hidupnya.

¹⁹⁸ Harjali. 2011. *Urgensi Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan*. Jurnal Cendekia. Vol. IX No. II. Juli-Desember 2011. Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

¹⁹⁹ Gunawan, Imam dan Anggraini Retno Palupi. 2012. *Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*. Jurnal Premiere Educandum. Vol. II No. II. Madiun: IKIP PGRI.

Di sini terjadi perbedaan mendasar antara teori yang dirumuskan oleh Bloom yakni tiga butir taksonomi hierarkisnya dengan empat pilar pendidikan UNESCO. Setidaknya secara jumlah keduanya tampak berbeda, yang disebut pertama berjumlah tiga butir dan yang kedua empat butir. Oleh karena itu, penulis memandang perlunya dilakukan upaya untuk merumuskan sebuah teori baru sehingga dapat mengurangi atau menambah, atau justru menggabungkan antara keduanya.

Empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO merupakan hasil laporan yang disusun oleh Jacques Delors (1925-sekarang) bersama rekan-rekannya pada tahun 1996, yaitu *learn to know*, *learn to do*, *learn to live together*, dan *learn to be*. Delors menjelaskan masing-masing poin tersebut di dalam bukunya pada bagian *pointers and recommendations*. Pertama adalah “belajar untuk mengetahui”, yaitu bahwa aktivitas ini dengan memadukan pengetahuan yang luas dan diikuti dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sebagian kecil mata pelajaran. Poin ini juga berarti *learning to learn*, yaitu belajar untuk belajar. Dengan demikian, seorang peserta didik dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan dari pendidikan yang tersedia dalam seluruh hidupnya. Ini juga berarti bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya sangatlah luas dan tidak ada batasnya. Termasuk juga masa untuk belajar,

tidaklah ada batas waktu seseorang untuk belajar. Apa saja, kapan saja, dan di mana saja haruslah selalu ada aktivitas belajar dalam diri seseorang.²⁰⁰

Kedua adalah “belajar untuk melakukan” dimaksudkan untuk memperoleh berbagai keterampilan dan bukan hanya suatu keterampilan saja, dengan lebih luas sifatnya, termasuk juga kompetensi untuk bekerja sama dengan banyak situasi dan kerja tim. Ini juga merupakan belajar berbuat dalam konteks pengalaman generasi muda dalam berbagai aktivitas yang mungkin bersifat informal sebagai akibat dari konteks lokal atau nasional, atau bahkan bersifat formal yang melibatkan berbagai kursus atau program belajar dan bekerja secara bergantian. Singkatnya, pilar ini menjelaskan bahwa keterampilan yang hendaknya dimiliki oleh peserta didik haruslah bervariasi, bukan hanya keterampilan tertentu saja. Hal ini tentu untuk membekali peserta didik agar selalu siap dalam menjalani kehidupannya dengan berbagai situasi dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan.

Ketiga adalah “belajar untuk dapat hidup bersama orang lain”, dengan cara mengembangkan pengertian akan orang lain dan apresiasi atas prestasi, bisa melaksanakan program bersama, juga belajar mengelola konflik dalam rangka menghormati nilai-nilai kemajemukan dan perdamaian. Tentu dalam hal ini seorang peserta didik diharapkan memiliki sikap-sikap positif agar ia dapat

²⁰⁰ Delors, Jacques, et.al. 1996. *Learning: The Treasure Within*. Report to UNESCO of the International Commissions on Education for the Twenty-fisrt Century. France: UNESCO Publishing. h. 37

menjalani kehidupan bersama dengan orang lain dengan baik. Peserta didik memiliki kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Sehingga ia diterima dalam tatanan sosial masyarakat, mendapatkan haknya sebagai individu dan bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Faktor perasaan seseorang merupakan kunci dari keberhasilan seseorang untuk dapat menguasai pilar ketiga ini.

Keempat adalah “belajar untuk menjadi”. Maksudnya yaitu seorang peserta didik dapat mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik. Yang dimaksud baik adalah kemampuan untuk bertindak mandiri, membuat pertimbangan yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab besar.²⁰¹ Acuan utamanya adalah bahwa seorang peserta didik mendapatkan kebebasan dalam bertindak dan memilih sikap. Kebebasan tersebut bukan berarti terlepas dari pengawasan, melainkan dengan adanya “harapan untuk menjadi”, seorang peserta didik akan selalu mengawasi dirinya dari hal-hal yang buruk.

Dari uraian tentang empat pilar pendidikan UNESCO di atas, penulis hendak mengasimilasikannya dengan teori taksonomi Bloom, agar dapat menemukan istilah yang tepat sebagai standar untuk mengkaji konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo dan Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas.

²⁰¹ Delors, Jacques, et.al. 1996. *Learning: The Treasure Within...*h. 38

Learning to know dengan definisinya di atas sesuai dengan aspek kognitif dalam taksonomi Bloom. *Learning to do* memiliki makna yang sama dengan aspek psikomotorik. Adapun *Learning to live together*, melihat ranahnya yang mengarah kepada sikap, maka termasuk dalam aspek afektif. Yang terakhir adalah *learning to be*. Istilah ini yang dalam taksonomi Bloom tidak mendapatkan tempat yang tepat di antara ketiga aspek. “*To be*” tidaklah dapat diwakili dengan kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Ia lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat harapan, keinginan, dan cita-cita. “Untuk menjadi” lebih bernuansa imajinatif karena ia merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut tidak berbentuk fisik namun dalam perjalanannya menjadi sangat berpengaruh terhadap ketiga aspek lainnya sebagai motivasi atau lainnya. Untuk itu, penulis menggunakan istilah teleologis, meminjam istilah dari M. Syifa A. Widigdo, yang berasal dari akar kata bahasa Yunani *telos* (tujuan dan maksud)²⁰² untuk menggantikan pilar “*learning to be*”.

Sebelum memasuki pembahasan, peneliti akan memaparkan kembali konsep revolusi mental Jokowi dan Pendidikan Karakter Al-Attas. Konsep pertama adalah sebuah upaya untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup, dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila (18 butir karakter)

²⁰² Widigdo, Muhammad Syifa Amin. Tanpa tahun. *Reorientasi Pemikiran Pendidikan dalam Islam (Beyond Ideology)*. Jurnal Cendekia.

yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tentu perubahan yang dimaksud di sini bersifat mendasar (radikal) dan dalam jangka waktu yang cepat.

Adapun konsep yang kedua adalah pengenalan dan pengakuan, yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan (hal dan keadaan ada).

1. Aspek Kognitif

Ranah kognitif mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skil intelektual.²⁰³ Dengan demikian, tampak bahwa konsep revolusi mental Jokowi secara eksplisit memberikan perhatian terhadap aspek ini meski hanya sepintas, di mana terdapat ungkapan perubahan “cara pikir” di samping cara kerja, cara hidup, dan sikap serta perilaku. Cara pikir di sini mewakili aspek kognitif sebagaimana cakupannya yang meliputi pola-pola prosedural dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skil intelektual. Demikian halnya dengan Al-Attas yang juga memberikan

²⁰³ Darmawan, I Putu Ayub dan Edy Sujoko. 2013. *Revisi Taksonomi Pembelajaran Benjamin S. Bloom*. Jurnal Satya Widya. Vol. XXIX No. I, Juni 2013. Universitas Kristen Satya Wacana.

penekanan terhadap aspek intelektual, yang dalam konsepnya digunakan istilah “pengenalan”. Al-Attas menjelaskan bahwa “pengenalan” yang dimaksud sama artinya dengan istilah *ta'allum* yang berarti belajar.²⁰⁴ Selain itu “pengenalan” merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengetahui sesuatu. Sehingga, kata kerja mengetahui pastilah berhubungan dengan objek yang disebut pengetahuan. Bagi Al-Attas, pengetahuan yang tercantum dalam konsep pendidikan karakternya adalah “tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu sesuai tatanannya”, yang tidak hanya berarti ilmu agama atau ilmu umum saja, melainkan ilmu secara keseluruhan.

2. Aspek Psikomotorik

Ranah psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik.²⁰⁵ Di sini, konsep revolusi mental Jokowi memberikan perhatian yang besar agar negara Indonesia mampu menjadi bangsa yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kata kuncinya adalah perilaku dan “mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia”, yang menandakan bahwa etos kerja (yang berarti keterampilan) hendaklah berkualitas tinggi. Karena untuk dapat berkompetisi dalam persaingan global, Indonesia setidaknya harus bisa menyamai kualitas etos kerja negara maju. Karena

²⁰⁴ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 51

²⁰⁵ Darmawan, I Putu Ayub dan Edy Sujoko. 2013. *Revisi Taksonomi...* h. 31

“kemampuan menyaingi” tentu haruslah melewati tahapan “kemampuan menyamai” terlebih dahulu. Dari sini terlihat bahwa ambisi Jokowi terhadap pengembangan keterampilan sangat besar, di mana kemajuan bangsa lain menjadi patokannya.

Demikian halnya Al-Attas, penggunaan istilah “pengenalan” yang mengacu kepada konsep ilmu dan amal, menunjukkan keluasan perhatiannya terhadap aspek psikomotorik. Secara bahasa agaknya istilah “pengenalan” tidak berkaitan dengan perbuatan atau aspek psikomotorik. Al-Attas tidak membedakan secara khusus antara aspek kognitif dan psikomotorik, karena memang konsepnya tentang pendidikan karakter tidak terpengaruh oleh pemikiran Barat yang dinilainya sekuler. Namun dalam konsepnya tentang ilmu dan amal, ia menegaskan bahwa sebuah ilmu tidaklah berarti tanpa adanya pengamalan.²⁰⁶ Menurutnya, ilmu tanpa pengamalan berarti sebuah kecongkakan, dan amal tanpa adanya ilmu berarti sebuah kejahilan. Maka dengan mengacu kepada konsep ilmu dan amal tersebut, istilah “pengenalan” dapat diartikan pula dengan amal, karena setiap ilmu pengetahuan yang baik tentu akan melahirkan konsekuensi dalam wujud pengamalan.

²⁰⁶ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion...* h. 22

3. Aspek Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi.²⁰⁷ Pada ranah ini pula Jokowi memberikan perhatian yang besar dalam konsep revolusi mentalnya. Beberapa istilah yang secara jelas tersebut dalam konsep tersebut adalah “cara hidup dan sikap yang berpedoman pada nilai integritas dan gotong royong”. Nilai integritas ini dilandasi dengan dasar-dasar kebangsaan yaitu UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia hendaklah memiliki karakteristik yang khas Indonesia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para leluhur bangsa ini,²⁰⁸ termasuk konsep Trisaksi Soekarno yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ditambah dengan adanya program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan formal yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa kepada peserta didik di sekolah.

Perhatian Al-Attas terhadap aspek afektif tampak pada penggunaan istilah “pengakuan”. Mengakui, dalam kamus bahasa Indonesia berarti menyatakan sah atau menyatakan berhak. Pemilihan kata yang dilakukan

²⁰⁷ Darmawan, I Putu Ayub dan Edy Sujoko. 2013. *Revisi Taksonomi...* h. 31

²⁰⁸ Pernyataan Joko Widodo saat menjadi narasumber dalam *Special Report* Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia di Waduk Pluit, Jakarta pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 dengan tema “Revolusi Mental”.

oleh Al-Attas bersifat global. “Pengakuan” yang dimaksud dalam konsepnya adalah pengakuan tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu sesuai tatanannya, termasuk tempat yang tepat bagi Sang Pencipta. Ini berarti bahwa, setelah melalui tahap pengenalan (kognitif dan psikomotorik), seorang manusia hendaklah meningkatkan dirinya kepada tingkat pengakuan (afektif) yang terjadi di dalam fakultas batinnya.

4. Aspek Teleologis

Aspek yang terakhir ini, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, berasal dari bahasa Yunani *telos* yang berarti tujuan atau maksud. Aspek ini juga turut memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan peserta didik, di samping kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebagaimana yang diuraikan dalam laporan Delors terkait empat pilar pendidikan UNESCO.

Konsep revolusi mental Jokowi bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik. Hal ini tampak secara eksplisit dalam konsepnya yang berbunyi “berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar”. Jokowi memandang bahwa saat ini bangsa Indonesia belumlah menjadi negara yang warganya dikategorikan baik. Oleh karena itulah revolusi mental bertujuan untuk memperbaiki bangsa Indonesia hingga menjadi warga negara yang baik.

Di lain sisi, Al-Attas tidak menjadikan sebuah negara sebagai patokan dalam perumusan konsep pendidikan karakternya, melainkan kepada ajaran agama Islam. Sehingga dalam konsepnya ia menyatakan “membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan”. Pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat merupakan susunan kata yang bersifat umum. Namun jika dicari kata yang mungkin dapat mewakilinya, kata tersebut adalah “keadilan”. Istilah keadilan dalam Islam merupakan antonim dari kezaliman, yang memiliki arti meletakkan sesuatu pada tempatnya.²⁰⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa aspek teleologis dari konsep pendidikan karakter Al-Attas adalah menjadikan peserta didik sebagai orang yang adil. Keadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengacu kepada penjelasan Al-Attas mengenai hakikat manusia. Manusia adalah binatang rasional yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hayawan al-natiq* yang berarti binatang rasional, dan rasionalitas manusia adalah akalanya. Yang kedua adalah hakikat manusia dengan fakultas batin yang dimilikinya untuk merumuskan makna-makna. Sikap yang adil bersifat umum, dan tidak ada tendensi terhadap negara saja maupun agama saja, namun keadilan akan memberi pengaruh positif terhadap keduanya.

²⁰⁹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan...* h. 50

F. Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu, merupakan gagasan yang menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Namun di lain sisi, banyak kalangan yang justru menilai revolusi mental Jokowi merupakan gerakank “kiri” yang diadopsi dari paham sosialis komunis. Banyak pakar dan tokoh yang memberikan bukti dan argumentasi terkait “kekirian” Jokowi dengan revolusi mentalnya, meski banyak juga para ahli yang menyanggahnya. Bagaimanapun, peristiwa adu argumentasi merupakan hal wajar dalam aktivitas nalar manusia dan tidaklah dilarang jika terjadi perbedaan pendapat.

Revolusi mental memang bukanlah hal baru yang memang baru digunakan oleh Jokowi untuk gerakannya. Secara historis, revolusi mental muncul sejak awal abad ke-19 dan dipopulerkan oleh Karl Marx yang mengikuti ajaran Hegel dengan aliran sosialis komunis. Dalam konteks Indonesia, revolusi mental juga pernah digunakan oleh DN Aidit, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mempengaruhi kaum proletar untuk mengadakan pemberontakan terhadap negara. Namun jika ditelusuri secara mendalam, revolusi mental Jokowi tidaklah sama dengan yang dicetuskan oleh PKI. Revolusi mental Jokowi terinspirasi oleh konsep Trisakti Soekarno, yang secara substantif bertujuan untuk membangkitkan kesadaran diri dan mengembangkan sikap pribadi bangsa Indonesia.

Dari sini dapat dipastikan bahwa konsep revolusi mental Jokowi berbeda dengan revolusi mental aliran komunis yang mengabaikan kesadaran diri dan sikap pribadi. Karena seandainya konsep revolusi mental Jokowi memberikan perhatian terhadap kesadaran diri, secara tidak langsung ide ini menerima kehadiran agama. Revolusi mental Jokowi tetap memandang agama penting dan perlu hadir dalam memberikan petunjuk hingga muncul kesadaran dalam diri bangsa Indonesia. Singkatnya, revolusi mental Jokowi secara historis memiliki kesamaan dengan revolusi mental komunis. Namun secara substantif revolusi mental Jokowi berbeda dengan ajaran komunis, dan justru memiliki orientasi yang sejalan dengan aliran non-kiri.

Dalam perspektif pendidikan karakter Al-Attas, konsep revolusi mental Jokowi sedikit berbeda lantaran landasan yang digunakan tidaklah sama. Al-Attas melandasi pemikirannya tentang pendidikan karakter hanya dengan ajaran agama Islam, lain halnya dengan Jokowi yang menjadikan wawasan kebangsaan (keindonesiaan) sebagai dasar dalam merumuskan konsep revolusi mentalnya, meski tidak meniadakan peran agama.

Dengan menggunakan empat standar (4 pilar UNESCO) untuk membandingkan konsep revolusi mental Jokowi dan pendidikan karakter Al-Attas, peneliti menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Dari aspek kognitif, konsep revolusi mental Jokowi hanya memberikan perhatian yang kecil, sementara Al-Attas memberikan penekanan yang seimbang dengan aspek

psikomotorik. Dalam aspek psikomotorik, revolusi mental Jokowi memberikan perhatian yang besar di samping aspek afektif, karena memang inilah fokus dari gerakannya. Lain dengan Al-Attas yang menempatkan aspek psikomotorik seimbang dengan kognitif, dan menekankan kepada aspek afektif. Hal ini dilakukan karena Al-Attas melihat jika seorang manusia telah menduduki posisi “pengakuan” tentu ia telah melalui tahapan “pengenalan” yang itu menjadi prasyarat dari yang disebut pertama. Sehingga penekanan Al-Attas kepada aspek afektif bersifat hierarkis. Adapun pada aspek terakhir, yaitu teleologis, terjadi perbedaan yang fundamental antara keduanya, di mana revolusi mental bertujuan untuk mencetak warga negara yang baik, sementara Al-Attas mencitakan terbentuknya seorang manusia yang adil (*insan kamil*).

Hasil uraian tentang empat aspek di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk dapat melakukan peninjauan terhadap konsep revolusi mental Jokowi dari perspektif pendidikan karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Setidaknya ada dua poin yang menjadi hasil penelitian ini. Pertama adalah bahwa konsep revolusi mental Jokowi memberikan penekanan utamanya kepada aspek psikomotorik dan afektif, yang nyaris mengabaikan aspek kognitif. Karena memang saat ini negara Indonesia sedang mengalami dekadensi moral dan membutuhkan perubahan terutama pada aspek sikap. Selain itu daya saing bangsa Indonesia dalam dunia internasional, sebagaimana survei oleh UNDP dan PISA, dinilai masih rendah dan keterampilan serta etos kerja perlu terus

dikembangkan. Sedangkan dalam pemikiran pendidikan karakter, Al-Attas memberi penekanan terhadap aspek afektif dengan istilah “pengakuan”. Berbeda dengan konsep revolusi mental Jokowi, meski menekankan kepada aspek afektif, Al-Attas tetap menjadikan “pengenalan” sebagai satu syarat untuk menduduki level “pengakuan”. Oleh karena itu, penekanan Al-Attas terhadap aspek afektif “pengakuan” yang terjadi dalam fakultas batin manusia, tidak serta merta mengabaikan aspek kognitif dan psikomotorik. Kedua aspek yang diistilahkan dengan “pengenalan” tersebut bersifat hierarkis yang tentu telah dilalui tatkala seorang manusia sudah masuk ke ranah “pengakuan”. Adapun Jokowi dengan sikapnya yang mengutamakan aspek afektif dan psikomotorik dalam konsep revolusi mental terlihat nyaris mengabaikan aspek kognitif. Bahkan dalam beberapa wawancara eksklusif yang membahas tentang revolusi mental, Jokowi hampir tidak pernah membahas unsur kognitif ini. Jokowi hanya fokus terhadap pembangunan manusia dari sisi afektif dan psikomotorik untuk membangun karakter bangsa dan keterampilan serta etos kerja agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Poin kedua adalah bahwa konsep revolusi mental Jokowi mencitakan upayanya untuk mencetak warga negara yang baik. Lain halnya dengan pandangan pendidikan karakter Al-Attas, menjadi warga negara yang baik saja tidaklah cukup. Hendaknya juga ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang kelak akan membimbing manusia menjadi orang yang adil, di mana fakultas batin atau

aspek afektif menjadi prioritas di samping aspek rasional atau akal manusia. Bukan untuk memomorduakan peran aspek rasional (ilmu dan amal), sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tetapi aspek rasional menjadi prasyarat tercapainya fakultas batin. Seorang manusia tidak akan mampu mencapai kebaikan dalam fakultas batin melainkan ia sudah melalui aspek rasional (kognitif dan psikomotorik) dengan baik. Oleh karena itu, penekanan Al-Attas terhadap aspek afektif merupakan upaya hierarkis yang jika seorang manusia telah mencapainya, tentu ia juga telah mencapai tingkatan-tingkatan yang berada di bawahnya. Dengan demikian, seorang manusia akan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat, sesuai dengan pertimbangan yang terjadi di dalam fakultas batinnya.

Singkatnya, pendidikan karakter Al-Attas mengupayakan manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai *'abdun* yang baik. Karena ketika seorang manusia dapat menjalankan dengan baik fungsi tersebut, ia akan menjadi *insan kamil* yang senantiasa menjalankan seluruh kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Jika demikian, seorang manusia juga telah menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* dengan baik. Maka, seorang manusia yang mencapai tingkatan *insan kamil* (*'abdun*) tentu juga akan menjadi warga negara yang baik. Tetapi warga negara yang baik (*khalifah*) belum tentu akan menjadi *insan kamil* yang dapat mengendalikan fakultas batinnya untuk selalu berbuat adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat.

Melihat penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa konsep revolusi mental Jokowi jika ditinjau dari konsep pendidikan karakter Al-Attas berada pada posisi *ta'dib* untuk menjadi *khalifah*. Adapun Al-Attas, konsep *ta'dib* yang dicanangkannya bertujuan untuk menjadi *'abdun* yang baik (*insan kamil*). Di samping itu perbedaan juga terjadi pada penekanan Revolusi Mental terhadap aspek afektif dan psikomotorik yang hampir mengabaikan aspek kognitif, sementara Al-Attas mengutamakan aspek afektif yang hierarkis (fakultas batin).